

Daftar Bacaan

BUKU

- Assiddiqie, Jimly. *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Lokakarya Nasional, Jakarta, 2007.
- Bamba, John. *Masyarakat Adat di Dunia, Perjuangan Global dan Tantangan Lokal*, Policy Press, Pontianak, 2002.
- Edison dan Nasrun. *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi, Kristal Media, Bukittinggi, 2010.
- Erwin, *Tanah Komunal Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Hutagalung, Arie Sukanti. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, “*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*”, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka Karunia, Jakarta, 1988.
- Navis, A.A. *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, 1984.
- Parindungan, A.P. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Rasjidi, Lili dan Ira Tahania. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Salim, H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- Sudiyat, Imam. *Hak Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Syahmunir, “*Kedudukan Wanita dalam Kepemilikan Hak Ulayat di Minangkabau*” dalam Alfian Miko, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang Andalas University Press, Padang, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Warman, Kurnia. *Pemulihan Tanah Ulayat, Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat*, Penerbit HuMa dan Qbarn, Jakarta dan Padang, 2010.
- Zein, Ramly. *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 51 /Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 394 PK/Pdt/2011.

JURNAL

- Alting, Husein. “*Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Tanah Di Maluku Utara Perpektif Dinamika Hukum Di Era Otonomi Daerah*”, Disertasi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2006.
- Eman, “*Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999*”, Majalah Yuridika, Vol.15 No.3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Maria SW. Sumardjono, 1990, *Telaah Konseptual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, pembahasan terhadap makalah Chadijah Dalimunthe “Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah menurut UUPA”*, disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Agraria ke-3, kerja sama BPN-FH USU, Medan, 19-20 September, <https://eprint.ums.ac.id/> diakses pada 20 Desember 2019.
- Mahrta.A.Lakburlawal, “Tanah Adat dan Pemanfaatannya Bagi Pengembangan Investasi Masyarakat Hukum Adat di Maluku”, <https://fhukum.unpatti.ac.id/> 2013/6/12 (diakses pada 20 Desember 2019).
- I Made Suwitra, “Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat di Bali”, Jurnal Perspektif Vol. 15 No. 02, 2010.
- Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, RIPP/UNDP, 2006.
- Suriyam Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2015.